

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI DALAM  
PERNIKAHAN SYĀH IMĀMIYAH MENURUT PANDANGAN  
ASATIZ YAPI BANGIL**

**SKRIPSI**



**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah**

**PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS	No. REG	: 5.2011/IS/87
K		
5-2011	ASAL BUKU :	
087	TANGGAL :	
45		

**Oleh**

**Siti Turoyah  
NIM : C51207050**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah  
SURABAYA  
2011**

**GADJAHBELANG  
8439407- 5953789**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skripsi yang ditulis oleh Siti Turoyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Dalilah Candrawati'.

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.

NIP 196006201089032001





































Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilaksanakan.

Sebagaimana pemaparan di atas, kedudukan saksi dalam pernikahan menurut *Syī'ah Imāmiyah* bukanlah menjadi kewajiban. Hanya saja jika menggunakan saksi dalam pernikahan merupakan anjuran yang tentunya tidak mencapai pada tataran wajib. Di YAPI Bangil ada beberapa *ustāz* yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyah*. Sebagai orang *Syī'ah Imāmiyah*, mereka berpandangan kalau saksi dalam akad nikah hanya sebuah anjuran. Namun, dalam pelaksanaan ketika dilaksanakan sebuah pernikahan mereka tetap menggunakan saksi dengan alasan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah khususnya dalam masalah pernikahan. Pandangan yang dimiliki *asātiż* tersebut berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Apalagi dalam kenyataannya mereka justru tetap menghadirkan minimal dua saksi dalam pernikahan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pandangan *asātiż* tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* serta pelaksanaannya di YAPI Bangil yang dituangkan dalam judul “Analisis Hukum Islam tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* menurut Pandangan *Asātiż* YAPI Bangil.”















mazhab empat yaitu Syāfi'i, Ḥanafī, Māliki dan Ḥambali serta KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang pernikahan khususnya yang membahas saksi dalam pernikahan.

- 2) Saksi : dua orang laki-laki yang hadir menyaksikan sebuah akad nikah atau prosesi ijab dan *qabūl*.
- 3) *Syī'ah Imāmiyah* : Yang dimaksud *Syī'ah Imāmiyah* dalam skripsi ini adalah *Syī'ah isna' asyariyah* yang mengakui dua belas imam, yaitu Ali bin Abi Ṭālib, Ḥasan bin Ali, Ḥusain bin Ali, Ali Zainal 'Abidin, Muhammad al-Bāqir, Ja'far aṣ-Ṣādiq, Musa bin Ja'far, Ali ar-Riḍa bin Musa, Muhammad al-Jawwād, Al-Hādi, Ḥasan al-'Askari, dan Muhammad al-Mahdi.
- 4) *Asātiż* : pengajar yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil baik yang menduduki jabatan fungsional maupun tidak serta memahami masalah fikih, terutama pernikahan.
- 5) YAPI Bangil : Yayasan Pesantren Islam (YAPI) yang bertempat di Jl. Bangil-Pandaan, desa Kenep kecamatan Beji kabupaten Pasuruan provinsi Jawa Timur.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Saksi dalam Pernikahan *Syī’ah Imāmiyah* menurut Pandangan *Asātib* YAPI Bangil” terbatas pada pembahasan tentang kedudukan saksi dalam pernikahan menurut pandangan *asātib* YAPI Bangil, rujukan hukum yang digunakan yang nantinya akan dianalisis dengan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang pandangan *asātib* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī’ah Imāmiyah*.
- b. Data tentang rujukan hukum *asātib* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī’ah Imāmiyah*.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya yakni *asātib* di YAPI Bangil yang bermazhab *Syī’ah Imāmiyah*.

## b. Sumber Data Sekunder

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.<sup>24</sup>

Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah:

1. Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* Lentera, 2010.
2. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fikih ‘Alā Mazāhib al-Arba‘ah*, 1990.
3. Sayyid Sābiq, *Fikih as-Sunnah*, 2006.
4. Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Ḥusaini, *Kifāyah al-Akhyār*, 1994.
5. Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid*, 2005.
6. Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 2003.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1) Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

pedoman wawancara.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai yaitu ketua pesantren, wakil *hawzah* yang sekaligus mengajar dan *ustāz* di YAPI Bangil.

## 2) Dokumentasi

Yaitu suatu kegiatan penelitian dengan cara mempelajari dan mencermati dokumen sebagai salah satu langkah untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis akan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup>

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan pandangan *asātiḥ* YAPI Bangil terhadap saksi dalam pernikahan *Syī'ah*

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.



tentang pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil; penggunaan rujukan hukum oleh *asātiż* YAPI Bangil; pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan; dan pelaksanaan kesaksian pernikahan.

Bab keempat merupakan bab analisis hukum Islam terhadap pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*, analisis terhadap rujukan hukum *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* dan analisis terhadap pelaksanaannya.

Bab kelima adalah bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



terdakwa. Keterangan itu diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa guna kepentingan penyelidikan serta pengadilan tentang suatu perkara pidana.<sup>3</sup>

Ulama fikih menyebut kesaksian yang diberikan seseorang dengan *al-isbat* (pembuktian), yaitu mengemukakan keterangan dan memberikan dalil yang dapat meyakinkan. Mayoritas fukaha menyebutnya *al-bayyinah*, yang diartikan dengan kata “syahadat atau persaksian”, yaitu ungkapan tentang berita yang benar di depan sidang pengadilan dengan mempergunakan lafal syahadat untuk menetapkan suatu atas diri orang lain.<sup>4</sup>

Dengan demikian saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu kejadian atau peristiwa. Adapun saksi dalam pernikahan berarti orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.

Mengenai dasar hukum saksi dalam pernikahan, Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas menyinggungnya<sup>5</sup>, namun dasar hukum saksi terdapat dalam hadis-hadis sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Nina M. Armando[et al.], *Ensikopedi Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 115.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 270.





terjadinya akad nikah (ijab dan *qabūl*) merupakan syarat sah nikah. Dengan demikian akad nikah yang tidak dipersaksikan, maka akad menjadi *fāsīd*.<sup>8</sup>

### 3. Hadis dari Abu Zubair al-Makkiy

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبِي بِنِكَاحٍ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ  
وَأَمْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.<sup>9</sup>

*Artinya: "Telah menceritakan kepada saya, dari Mālik, dari Abī az-Zubair al-Makkiy bahwa Umar bin Khaṭṭāb menerima pengaduan adanya pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu jawabnya: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan, dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan kurajam."*

Hadis-hadis di atas sekalipun martabatnya lemah, namun satu dengan yang lain menguatkan. Hal ini sebagaimana komentar yang dilontarkan Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Auṭār* bahwasanya hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam menetapkan akan keharusan dua saksi dalam akad nikah adalah hadis-hadis *ḍā'if*, tetapi hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu sama lainnya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> 'Alāuddīn Abī Bakar ibn Mas'ud al-Kasāni, *Badāi' u as-Ṣanāi' fi Tartīb as-Syarāi'*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.) 392.

<sup>9</sup> Mālik, *Al-Muwaṭṭa'*, (Muassasah Zāyid bin Sulṭan Ali Nahyan, 2004), 767.

<sup>10</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Auṭār*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 134.

## B. Syarat-Syarat Saksi

Pernikahan merupakan peristiwa penting bagi umat manusia. Tidak heran jika momen ini diselenggarakan dengan acara seremonial. Hal ini tidak bertentangan agama selama masih dalam batas yang wajar. Mengingat betapa pentingnya pernikahan tersebut, dalam upacara pernikahan diperlukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah syarat yang berkaitan dengan saksi.

Masing-masing ulama fikih menetapkan syarat-syarat saksi dengan beragam. Sayyid Sābiq menyebutkan bahwa syarat menjadi saksi yaitu berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab *qabūl* pernikahan.<sup>11</sup>

Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* menyebutkan 6 syarat untuk menjadi saksi, yaitu: Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.<sup>12</sup>

Sedangkan golongan *Ḥanafīyyah* menetapkan 5 syarat untuk menjadi saksi, yaitu:

1. Berakal, orang gila tidak boleh menjadi saksi.
2. Balig, kesaksian anak kecil tidak boleh.
3. Merdeka, sehingga hamba sahaya tidak boleh menjadi saksi.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 480-481.

<sup>12</sup> Taqiyuddin Abī Bakar Muhammad al-Ḥusainiy, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 41.









kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanya yang menghadiri adalah laki-laki. Karena itu tidak sah akad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan.<sup>26</sup>

Tetapi golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah.<sup>27</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 di atas.

Akad nikah sama dengan jual beli, yaitu perjanjian timbal balik ini dianggap sah dengan saksi dua orang perempuan di samping seorang laki-laki.<sup>28</sup>

Mengenai perempuan boleh memberikan kesaksiannya atau tidak, seorang aktivis dan pemerhati tentang isu perempuan Syafiq Hasyim memberikan komentar bahwa pada dasarnya perempuan dalam persoalan kesaksian menghadapi dua hal. *Pertama*, perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menjadi saksi. *Kedua*, meskipun boleh memberikan

---

<sup>26</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh*, 481.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*



kesaksian, nilai kesaksian dua perempuan sama nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki.<sup>29</sup>

d) Jumlah saksi

Saksi sekurang-kurangnya dua orang sebagaimana telah disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh *Dār al-Quṭni* di atas.

*Ḥanafiyah* membenarkan dalam kasus seperti: seseorang menyuruh orang lain untuk menikahkan anaknya yang masih kecil (belum dewasa). Pada saat itu ada seorang laki-laki yang hadir bersama bapak anak wanita itu sebagai saksi. Pernikahan seperti ini dipandang sah, karena bapaknya ikut serta menyaksikan akad nikah itu. Berbeda sekiranya bapaknya tidak ikut menyaksikan, seperti tidak ada di tempat, nikah itu tidak sah karena saksi hanya seorang saja.<sup>30</sup>

e) Adil

Adil berasal dari kata bahasa Arab *al-‘adlu*. Akar kata dari *‘adala*-*ya ‘dilu-‘adālah*. Sedangkan orang yang adil adalah *‘ādil* berupa isim *fā‘il*. Artinya adalah ketulusan hati, yang sama, sepadan. Adapun persamaan kata dari *al-‘adlu* adalah *al-amruḥ mutawassīṭu* yang artinya perkara yang tengah-tengah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 228.

<sup>30</sup> *Al-Jazīrī, Al-Fiqh*, 20.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munir, *Al-Munawwir*, 905-906.



orang *ahli al-kitāb* boleh diterima dan pendapat ini diikuti oleh Undang-Undang Mesir.<sup>36</sup>

f) Melihat dan mendengar

Saksi harus orang yang melihat dan tidak bisa diterima orang yang buta. Demikian pendapat yang kuat menurut *Syāfi'iyah*. Sedangkan *jumhūr ulama* dapat menerima kesaksian orang yang buta asalkan ia dapat mendengar dengan baik ijab dan *qabūl* itu dan dapat membedakan suara wali dengan calon pengantin laki-laki itu.<sup>37</sup>

Saksi harus mendengar ucapan dua orang yang berakad semuanya, sehingga apabila yang mendengar salah satunya saja yang lain tidak, ataupun mendengar ucapan dengan kedua orang yang berakad dan ucapannya lain maka tidak sah nikah, karena saksi yang dikehendaki adalah hadirnya saksi yang menjadi rukun akad nikah dan rukun akad yaitu ijab *qabūl* maka apabila saksi tidak bisa mendengar ucapan ijab dan *qabūl* maka tidak jelas saksi menjadi rukun, maka tidak ditemukan syarat rukun.<sup>38</sup>

Akad nikah tidak sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi yang muslim keduanya, *mukallaf*, merdeka, laki-laki dan adil dan juga disyaratkan lagi saksi harus dapat diterima kesaksiannya untuk setiap orang untuk kedua

---

<sup>36</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh*, 481.

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 152.

<sup>38</sup> Al-Kasāni, *Badāi' u as-Ṣanāi'*, 401.





mengatakan maksud daripada saksi adalah untuk meredam perselisihan dan pengingkaran maka berpendapat bahwa saksi merupakan syarat penyempurnaan.<sup>45</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi dalam akad nikah masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan saksi itu wajib dalam akad nikah ada juga yang mengatakan tidak.

#### D. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membutuhkan pengakuan dari pihak lain bahwa dirinya sudah menjalankan pernikahan yang sah menurut agama.<sup>46</sup> Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (tanpa saksi) akan mengundang prasangka buruk, dan menimbulkan fitnah. Dalam bahasa sederhananya, pernikahan yang demikian akan menimbulkan bermacam-macam gosip miring yang merugikan bagi pasangan pengantin (terutama) dan semua keluarganya.

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan, sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, 15.

<sup>46</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan*, 228.

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 153.



Pernikahan juga berkaitan dengan pihak lain yang turut terlibat dalam hak kedua belah pihak yang berakad, yaitu anak-anak. Karena itu dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi agar nantinya ayahnya tidak mengingkari keturunannya.<sup>50</sup>

Sehubungan dengan anak-anak adalah untuk memelihara hak-hak mereka dalam warisan. Sebagaimana pendapat Al-Jurjawi bahwa pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, di antaranya memelihara hak-hak dalam warisan.<sup>51</sup>

Dari sekian banyak pemaparan di atas, Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* menyebutkan hikmah adanya saksi dalam pernikahan secara rinci, yaitu: sebagai alat bukti, apabila ada yang menggugat keabsahan pernikahan; *i'lān*, dengan hadirnya saksi-saksi di waktu akad nikah, maka *i'lān* yang minimum akan terlaksana, kehadiran saksi-saksi di waktu akad nikah merupakan penghormatan kepada kedua mempelai, dan merupakan penghormatan bagi sunah Rasulullah SAW.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh*, 480.

<sup>51</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Mesir: al-Azhar, 1992), 258.

<sup>52</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, 105.











## 2. Metode *Istinbāt* Hukum *Syī'ah Imāmiyah*

Dasar *tasyrī'* mazhab ini adalah al-Qur'an, *sunnah*, *ijmā'* yang menurut mereka persetujuan ulama yang dibenarkan oleh imam yang *ma'sūm*, bukan semata-mata persetujuan pendapat ulama dan akal pikiran (rasio). Mengenai *sunnah* mereka hanya menerima hadis-hadis yang perawi atau sanadnya kepada ahli bait.<sup>11</sup>

Sebagaimana halnya dengan mazhab *Sunnī*, maka golongan *Syī'ah* berpendapat bahwa pokok-pokok pegangan mereka dalam menetapkan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, ialah<sup>12</sup>:

- 1) *Al-Kāfi* disusun oleh Ja'far Muhammad bin Ya'kub Al-Kulaini (wafat 329 H.)
- 2) *Man lā Yadhurul faqīh* disusun oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali Husain (wafat 381 H.)
- 3) *At-Tahzīb*
- 4) *Al-I'tibār*. Dua buah buku terakhir ini disusun oleh Muhammad bin Hasan at-Ṭūsi.

Di antara penganut *Syī'ah Imāmiyah* terdapat perbedaan pendapat dalam menggunakan akal sebagai pokok pegangan dalam menetapkan hukum. Ada dua golongan dalam hal ini, yaitu:

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 242-243.

<sup>12</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, 108.

a) Golongan *Akhbāriyyah*

Akbari berasal dari kata *akhbār*, bentuk jamak dari khabar, artinya berita atau informasi. Dalam ilmu *muṣṭalāh al-hadīṣ* term khabar digunakan untuk istilah selain dari hadis Nabi.<sup>13</sup>

Golongan *Akhbāriyyah* berpendapat bahwa mereka hanya berpegang kepada empat kitab di atas, semua hadis yang terdapat dalam kitab-kitab itu dapat dijadikan dasar *hujjah*, karena semuanya adalah hadis sahih.<sup>14</sup> Dengan kata lain, golongan *Akhbāriyyah* dapat dipahami sebagai ahli hadis.

b) Golongan *Uṣūliyyīn*

Term *uṣūli* berasal dari kata *aṣl*, berarti dasar, fundamen, prinsip atau sumber hukum Islam. Dalam perspektif *Sunnī* golongan *Uṣūliyyīn* bisa dipahami sebagai ahli *ra'yi*.<sup>15</sup>

Golongan *Uṣūliyyīn* mempelajari *uṣūl* fikih dan menggunakannya dalam *istinbāṭ* hukum, karena itu mereka meneliti dan menilai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang empat itu. Setelah mereka yakin kesahihan hadis-hadis itu barulah mereka menggunakannya sebagai dasar *hujjah*.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 243.

<sup>14</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, 108.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 243.

<sup>16</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, 108.











Adanya saksi dalam pernikahan pada dasarnya adalah untuk menjaga *nasab* dan urusan waris. Sebagaimana hadis berikut:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْحُدُودِ.<sup>27</sup>

*Artinya: "Ali bin Ibrāhīm dari bapaknya, Muhammad bin Yahya dari Abdillah bin Muhammad secara bersama-sama, dari Ibnu Abi 'Umayr, dari Hisyām bin Sālim, dari Abī 'Abdillah berkata: sesungguhnya kesaksian itu dijadikan untuk nasab dan waris. Dalam riwayat lain untuk hudūd."*

Mereka bersih kukuh pada pendapat tersebut, dengan alasan bahwasanya di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kesaksian dalam pernikahan, tetapi Allah memerintahkan kesaksian itu dalam masalah jual beli dan hutang. Sebenarnya, masalah saksi dalam pernikahan itu lebih banyak dibutuhkan untuk menjaga *nasab*, menghilangkan prasangka buruk, warisan dan lain-lain. Oleh karena itu, jikalau saksi dalam pernikahan menjadi syarat, mengapa Allah mempermudah urusan ini dalam al-Qur'an yang dapat menghilangkan hikmah.<sup>28</sup>

Adapun hadis yang juga dijadikan dasar mengenai tidak wajibnya saksi dalam pernikahan oleh *Syī'ah Imāmiyah* adalah sebagai berikut:

<sup>27</sup> Al-Kulayny, *Al-Kāfi*, 387.

<sup>28</sup> Abū al-Qāsim, *Al-Mukhtasar an-Nāfi'*, 171.



## B. Pandangan *Asātib* YAPI Bangil tentang Saksi Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*

### 1. Profil YAPI Bangil

Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil didirikan oleh almarhum *ustāz* Husein bin Abu Bakar al-Habsyi pada tanggal 21 Juni 1976. Pesantren ini awalnya hanya mengembangkan pendidikan agama murni. Tetapi sejak tahun 1997, mulai mengembangkan perpaduan antara pendidikan Agama dan Umum. Pesantren ini adalah salah satu pesantren yang mengembangkan wawasan diniyah keagamaan yang beragam. Di mana dalam Pesantren ini tidak hanya diajarkan kurikulum pesantren pada umumnya (mulai al-Qur'an, hadis, tafsir, falsafah, *mantiq* dan lain-lain). Pesantren ini juga mengajarkan dan mengembangkan pemikiran *Syī'ah* di samping tentunya *Ahlus Sunnah*.

Sebagai lembaga dakwah dan pendidikan, YAPI berkiprah dalam pengelolaan lahan-lahan pendidikan keagamaan yang bertujuan mencetak para santri yang diharapkan mampu menjadi cikal bakal bagi sumber daya manusia masa depan yang tangguh serta mampu menyikapi berbagai masalah secara arif. Demi meraih tujuan-tujuannya, YAPI merasa berkewajiban menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dianggap perlu dan sesuai dengan lingkup kegiatannya. Kurikulum dan aktivitas Pesantren di rancang sesuai dengan kebutuhan para santri dalam membina dirinya menjadi pribadi muslim berkeyakinan lurus (benar) dan sadar akan kewajiban-kewajibannya, baik hubungan dengan Tuhan maupun antar sesamanya, serta

memiliki kapasitas keilmuan yang memadai terutama ilmu-ilmu keislaman, sebagai dasar pijakan dalam menyikapi problema kehidupan secara proporsional.

Sebagai lembaga pendidikan yang profesional, pada mulanya YAPI hanya mengacu pada pendidikan keagamaan murni, kemudian melangkah menjadi pendidikan terpadu. Pola pendidikan ini menyajikan program pesantren dan program umum dengan formulasi yang berimbang. Dengan demikian maka para santri akan lebih leluasa untuk menekuni disiplin ilmu yang mereka harapkan dengan tidak merasa khawatir akan kelanjutan pendidikan se usai mereka menyelesaikan studinya di YAPI. Dengan pertimbangan yang matang dan kajian yang dalam, maka YAPI pada tahun pelajaran 1997-1998 mengadakan perombakan program pendidikan. Yaitu membuka pendidikan *Takhasus* (Diniyah) yang mengedepankan kurikulum Pesantren, SMP/SMA yang menyajikan kurikulum Depdikbud. dan kurikulum Pesantren serta Taman Kanak-Kanak (TK-Plus) Al-Abrar.

## 2. Sekilas tentang Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* di YAPI Bangil

Allah menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu dan membuatnya merasa nyaman serta mempunyai perasaan mencintai terhadap lawan jenisnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan pernikahan agar hubungan antara kedua lawan jenis tersebut halal.











dalam pelaksanaan ketika beliau menikah tetap menghadirkan saksi. Bahkan saksi itu dihadirkan dari kedua belah pihak.<sup>33</sup>

### 3) *Ustāz* Segaf

*Ustāz* yang telah mengajar di YAPI Bangil selama kurang lebih enam tahun ini menyatakan bahwa kesaksian dalam pernikahan bukan merupakan syarat sah, melainkan hanya sunah saja. Beliau juga menyatakan bahwa rujukan yang dijadikan dasar adalah kitab *Tahrīr al-Wasīlah* yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa atau kitab yang dijadikan orang-orang *Syī'ah* dalam mengerjakan amal ibadah harian yaitu:

يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْعَقْدِ وَالْإِعْلَانُ بِهِ...

*“Disunahkan menyaksikan akad dan mengumumkannya...”*

Namun dalam ranah praktis, beliau juga menyatakan bahwa pernikahan yang beliau laksanakan tetap menghadirkan saksi karena mengikuti peraturan yang telah diterapkan pemerintah. Misalnya mulai dari pencatatan nikah dan melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sirajuddin, *Wawancara*, 13 Juli 2011.

<sup>34</sup> Segaf, *Wawancara*, 19 Juli 2011

## 5. Pelaksanaan Kesaksian Pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*

Sebagai penganut mazhab *Syī'ah Imāmiyah* yang menyatakan bahwa saksi dalam pernikahan bukan merupakan kewajiban, namun dalam pelaksanaannya, rupanya mereka tetap menggunakan saksi.

Selain itu, dalam melakukan pernikahan mereka juga mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh negara. Misalnya saja dalam masalah pencatatan. Tentunya ketika pernikahan itu dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), maka di situ pula akad nikah dilaksanakan di depan penghulu dan di hadapan saksi. Sebagaimana yang telah dituturkan *ustāz* Segaf yang melakukan pernikahannya di Malang.<sup>35</sup>

Adapun *ustāz* Siraj yang melangsungkan pernikahannya di Qum, Iran tujuh tahun silam mengaku bahwa pernikahannya itu juga menggunakan saksi. Padahal kalau di lihat negara Iran merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah bermazhab *Syī'ah*. Saat itu beliau masih tercatat sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Qum. Tepatnya setelah dua tahun belajar di sana, beliau berkehendak untuk menikah dengan wanita asal Sumenep yang sama-sama menjadi mahasiswa di Iran. Demi mewujudkan kehendaknya untuk menikah beliau mengisi *form* yang di situ juga dicantumkan nama saksi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sirajuddin, *Wawancara*, 19 Juli 2011













kecurigaan-kecurigaan dari pihak lain yang menyangsikan nikah tersebut di kemudian hari.

Dewasa ini, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pernikahan juga dilaksanakan di hadapan penghulu, di samping tetap menghadirkan dua orang saksi. Hal demikian diharapkan agar pernikahan itu benar-benar sah menurut agama juga menurut peraturan negara. Disadari atau tidak, jika hanya mengandalkan kepada dua saksi yang nantinya bisa dijadikan alat bukti, maka masalah pencatatan nikah juga menjadi penting. Karena kita tahu bahwa dimungkinkan saja saksi yang dibutuhkan itu rumahnya saling berjauhan atau pun sudah meninggal. Dengan adanya pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama), maka sebuah pernikahan pun akan mendapatkan legalisasi hukum yang kuat dengan akta nikah. Di sinilah letak masalah dengan adanya pencatatan nikah.

Kehadiran saksi dalam akad nikah sangat urgen karena menyangkut kepentingan kerukunan rumah tangga, dan juga anak keturunan. Sehingga suami tidak akan mengingkari istri terlebih menya-nyikan anak keturunannya. Tidak kalah penting juga untuk menampik kecurigaan, prasangka buruk atau pun fitnah dari orang lain.

Dalam Islam juga dikenal dengan adanya *hifzun nasl*. Islam sangat menghargai dan menjaga agar kehormatan keturunan yang dilahirkan oleh seseorang. Anak yang dilahirkan harus dididik, dijaga dan diawasi. Oleh karena

itu masalah pernikahan juga membutuhkan lembaga pernikahan yang teratur demi meminimalkan terjadinya *broken home*.<sup>4</sup> Selain itu agar tuduhan zina pun tidak melekat pada orang yang sejatinya sudah melangsungkan akad pernikahan.

Apabila pandangan *asātiẓ* YAPI Bangil ini diterapkan dalam kehidupan sekarang, tentu saja sudah tidak relevan. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju dan gaya hidup manusia yang semakin modern, membuat segalanya membutuhkan kejelasan dan penyelesaian secara lembaga. Dikhawatirkan semakin banyak orang yang melakukan pernikahan dengan tanpa menggunakan saksi.

Dari pemaparan di atas, penulis kurang sepakat dengan pandangan *asātiẓ* YAPI Bangil karena pernikahan akan terus terjadi dari masa ke masa yang dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi. Untuk menghindari penyelewengan maupun pengingkaran, saksi memang diperlukan adanya. Kesaksian tidak hanya dilakukan dalam masalah muamalah seperti jual beli saja, akan tetapi dalam pernikahan saksi juga menempati posisi yang penting. Bagaimana pun juga saksi dapat memberikan keterangan atau pun kesaksiannya mengenai apa yang terjadi sebenarnya jika suatu saat timbul perselisihan ataupun kecurigaan.

---

<sup>4</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 551.



karena hadis-hadis yang menerangkan mempersaksikan nikah merupakan hadis yang *masyhūr* (populer).<sup>7</sup>

Rujukan hukum yang dipakai oleh mereka adalah kitab fatwa yang ditulis oleh Imam Khamayniy. Sementara bagi pengikut *Syi'ah Imāmiyah* bertaklid kepada imam merupakan suatu keharusan. Selama Imam al-Mahdi belum keluar, maka bagi orang-orang *Syi'ah Imāmiyah* merujuk segala urusan agama kepada ulama *marāji'* yang dianggap mampu untuk berijtihad mengeluarkan fatwa-fatwa seiring dengan persoalan baru yang semakin berkembang.

Pada dasarnya orang yang memberikan fatwa itu hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan *muftī* atau orang yang ahli fikih berusaha mencari jawabannya. Jika ditelusuri lebih lanjut, ketika Imam Khamayniy berfatwa bahwa saksi dalam pernikahan adalah sunah, maka hal itu ditemukan dalam hadis yang dipakai mereka, yaitu ketika Imam Ja'far aṣ-Ṣādiq ditanya mengenai seseorang yang menikah tanpa saksi. Saat itu beliau memang tidak mempermasalahkan menikah yang demikian.

Fatwa yang baik dari seorang mujtahid adalah mengetahui secara persis apa yang dimintakan fatwa, mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat lingkungannya agar diketahui mana yang lebih besar dampak negatif

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6560-6561.

atau buruknya. Hal seperti ini hendaknya dilakukan oleh seorang mujtahid/*mufti*.<sup>8</sup>

Menurut penulis, fatwa itu hanya berlaku bagi orang yang meminta fatwa tersebut. Jadi, jika dikembalikan kepada *asātib* YAPI yang tinggal di Indonesia, maka fatwa imam Khamayniy tersebut tidak cocok. Apalagi di Indonesia juga mempunyai aturan tersendiri mengenai pernikahan, di antaranya apa yang tertuang dalam KHI.

Selain itu perselisihan pendapat tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam memaknai *sunnah*. *Sunnah* yang diterima *Syī'ah Imāmiyah* adalah *sunnah* yang diriwayatkan oleh ahli bait saja. Sedang hadis yang biasa dipakai ulama adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi SAW. Jika dilihat hadis yang dipakai *asātib* YAPI hanya sampai kepada imam mereka saja yaitu Ja'far bin Ṣādiq. Sedangkan hadis yang dipakai *jumhūr* ulama merupakan hadis riwayat sahabat yaitu Ibnu 'Abbās dan 'Āisyah.

Mengenai ayat al-Qur'an yang masih global, maka hadis inilah yang berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya masalah pernikahan yang terdapat dalam al-Qur'an yang tidak diatur secara rinci, seperti perintah *walimah*, wali atau pun saksi. Jadi, mengenai tata cara pernikahan ini memang ditemui dalam hadis-hadis.

---

<sup>8</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 595.







*Muhammad bin Yazid bin Sinan menceritakan, bahwasanya bapakku menceritakan dari Hisyām bin ‘Urwah dari bapaknya dari ‘Aisyah berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”*

Adapun jika melihat pendapat mazhab *Syī‘ah Imāmiyah* yang mengatakan saksi dalam pernikahan hanyalah sunah, maka bagi *asātiḥ* YAPI Bangil telah mengerjakan hal sunah menurut mazhab mereka. Di mana menghadirkan saksi dalam pernikahan bukanlah hal yang ketat. Jika melaksanakan pernikahan menghadirkan saksi, maka akan mendapatkan pahala sunah. Sebaliknya, jika pernikahan itu tidak dihadiri saksi maka bila ditinjau dari mazhab *Syī‘ah Imāmiyah* hal tersebut tidak berkonsekuensi apa-apa terhadap keabsahan nikah.

Mereka mengikuti apa yang telah dilaksanakan para imamnya. Di mana Ja‘far aṣ-Ṣādiq pernah ditanya mengenai pernikahan yang tidak menggunakan saksi, maka menurut beliau tidak apa-apa. Dan sebagaimana diketahui pula, orang-orang *Syī‘ah* hanya menerima hadis yang sanadnya dari ahli bait saja.

Menurut penulis, selama pernikahan itu telah terpenuhi syarat dan rukunnya dalam arti terdapat wali, calon suami, calon istri dan saksi yang terdiri dari dua orang dan telah tercukupi semua syarat dan rukunnya, maka pernikahannya sah. Apalagi di Indonesia ini ditambah dengan dilaksanakannya akad nikah di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dari KUA untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap peristiwa

pernikahan oleh warganya, maka praktek pernikahan yang demikian sah menurut agama dan juga peraturan perundangan yang ada.

Pelaksanaan pernikahan yang demikian akan membawa kemaslahatan bagi kedua mempelai, karena suatu saat mampu untuk membuktikan keabsahan pernikahannya baik di mata agama maupun di mata hukum negara karena ia bisa menunjukkan saksi sebagai alat bukti telah dilangsungkannya akad nikah dan bukti tertulis akta nikah yang dikeluarkan lembaga negara yang berwenang yakni KUA di wilayah kecamatan di mana peristiwa pernikahan itu dilaksanakan.

Perihal kedudukan saksi dalam mazhab *Syī'ah Imāmiyah* bukan menjadi penentu keabsahan nikah, tapi melihat kondisi zaman sekarang yang semakin maju maka perlulah kiranya peristiwa sesakral pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi dan diberitahukan ke khalayak umum.

Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh *asātīz* YAPI Bangil. Hal yang memotivasi mereka dalam menghadirkan saksi dalam akad nikah karena semua itu tidak terlepas dari hikmah yang ada di balik kesaksian pernikahan.

Kiranya akan mudah jika pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi. Hal itu akan terlihat bilamana muncul kecurigaan, prasangka buruk yang datang dari masyarakat. Di saat seperti inilah kedua saksi akan tampil sebagai alat bukti dalam menjelaskan dengan sebenarnya apa yang telah terjadi. Setelah kedua saksi itu menjelaskan semua yang diketahui, diharapkan tudingantudingan negatif yang mengarah kepada kedua pasangan yang telah menikah ini

akan menjadi reda dan masyarakat akan percaya bahwa kebersamaan kedua pasangan itu memang telah sah dalam sebuah ikatan pernikahan yang suci.

Selain itu, keberadaan saksi juga untuk mengantisipasi apabila terjadi pengingkaran dari salah satu pasangan tersebut. Apalagi kalau sudah menyangkut anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah masalah warisan.

Jadi, menurut penulis apa yang telah dilaksanakan oleh *asātiẓ* di YAPI itu sudah tepat. Meskipun kedudukan saksi dalam mazhab mereka adalah sunah, namun dalam pelaksanaan di kehidupan nyata mereka tetap melaksanakan pernikahan dengan dihadiri para saksi. Hal ini dilakukan karena mereka mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang timbul dari disaksikannya akad nikah bagi kedua pasangan.

Bertolak dari penjelasan di atas, penulis juga berpendapat bahwa *asātiẓ* di YAPI tidak menganggap enteng sebuah pernikahan yang bisa dilakukan dengan seenaknya tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya.







- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993
- Malik, *al-Muwaṭṭa*, Muassasah Zāyid bin Sulṭan Ali Nahyan, 2004
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002
- Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Auṭār*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010
- Muslim Fathoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1991, 107.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2006
- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2006
- Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001
- Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Penerjemah: Asywadie Syukur, Al-Milal wa al-Nihal Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Islam, buku I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006
- Syamsuddin as-Sarkhasiy, *Al-Mabsūf*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t
- Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al Ḥusaiyniy, *Kifayah al-Akhyār*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2005

Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

---

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Perkawinan (Edisi Terbaru 2010)

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: 2001